

DEVELOPING REGIONAL COMPETITIVENESS BASED FISHERY HARBOUR LANDING FISH (PPI) PEUDADA BIREUEN DISTRICT-ACEH

Rahmad ^{1*)}

¹Dosen FISIP Universitas Almuslim Bireuen

*) rahmad_1984@ymail.com

ABSTRACT

Geographically Bireuen known as the golden triangle region of Aceh's economy because it is located in the central province of Aceh . Most of the district is a coastal region with the support of several Fish Landing Base (PPI), which became the base supporting sectors of the regional economy. PPI Peudada is the largest, and its existence is important to develop the local economy. And can spearhead Locally Generated Revenue (PAD) in Bireuen. The purpose of this study was to determine the existence of PPI Peudada the supporting sectors of the economy and into alternative community income, and to determine the development of regional competitiveness based fishery. Results of the study became the basis for local authorities to issue a new policy in implementing the new economic region in Bireuen, administratively birth of favorable policies of the fishermen, businesses and regions in the development of his attempt. In terms of economic policy and its implementation affect the original reception area of the fisheries sector, and will open up new employment opportunities for the community and the surrounding region PPI Peudada .

Keywords: Fisheries, PPI, Regional Competitiveness

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh memiliki sumber daya kelautan dan pesisir yang berlimpah serta memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Kekayaan alam dan letak geografis menjadi modal ekonomi penting dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah berbasis perikanan.

Sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor andalan Provinsi Aceh. 55 % penduduk Aceh sangat bergantung pada sektor ini (Yusuf, 2003 dalam Muchlisin, Nazir, Musman, April 2012). Untuk itu, sektor ini harus menjadi perhatian khusus dan menjadi program unggulan bagi pemerintah daerah.

Kabupaten Bireuen yang secara geografis terletak di tengah Provinsi Aceh, dikenal sebagai kabupaten segitiga emas ekonomi Aceh karena diapit oleh 5

(lima) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Secara administratif kabupaten ini memiliki 17 kecamatan dengan 426.089 Jiwa serta luas wilayah sekitar 1.901,21 Km² atau 1796,32 Km² (Kemendagri. go.id, 10 Agustus 2014 dan Bireuen Kab.bps.go.id, 10 Agustus 2014).

Sebagian wilayah kabupaten ini merupakan kawasan pesisir pantai dengan didukung beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu PPI Kuala Jangka, Kuala Jeumpa, Peudada, Jeunib, Pandrah, dan Bate Iliiek yang menjadi pangkalan sektor pendukung ekonomi daerah. Perikanan dapat menjadi salah satu komoditas andalan kabupaten ini, sekaligus menjadi alternatif pendapatan masyarakat.

Sebelumnya keadaan ekonomi Bireuen dipengaruhi oleh kondisi keamanan yang tidak kondusif berupa

konflik bersenjata antara GAM dan TNI. Namun saat ini situasi telah berubah setelah penandatanganan MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005. Masyarakat dapat bekerja maupun mencari pekerjaan dengan tenang. Secara umum perdamaian Aceh menjadi faktor penting dan pendukung bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi yang tentunya berdampak pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Keberadaan PPI Peudada di Kecamatan Peudada sangat penting bagi Kabupaten Bireuen. Sebagai PPI terbesar, letaknya juga sangat strategis, berada tidak jauh dari jalan raya Aceh-Medan. Keberadaannya sebagai penyokong ekonomi dan pendapatan daerah diharapkan menjadi contoh dan barometer pengembangan ekonomi berbasis perikanan laut. Namun disayangkan, hingga kini sebagai PPI terbesar, dalam perkembangannya belum menunjukkan kontinuitas yang positif. Artinya sektor perikanan dan kelautan belum menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberadaan PPI Peudada yang menjadi sektor pendukung ekonomi Kabupaten Bireuen dan menjadi alternatif pendapatan masyarakat, dan untuk mengetahui pembangunan daya saing daerah yang berbasis hasil perikanan.

2. Landasan Teoritis

Sumber Daya Laut

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan serta keanekaragaman hayati laut laut terbesar di dunia, dan memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada (Danuri et.al 1996). Kekayaan alam inilah yang menyebabkan beberapa negara di Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda silih berganti pada masa lalu menjajah Nusantara. Kekayaan ini pula yang menjadikan Indonesia negara yang mampu menarik banyak investor untuk menanam modalnya di Indonesia.

Kekayaan sumber daya laut yang berlimpah ini tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia. Umumnya nelayan di Indonesia termasuk dalam kelompok nelayan tradisional, yaitu nelayan yang menggunakan peralatan tangkap tradisional dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan (Sudarso, 2014). Ditemukannya persoalan klasik, yaitu ketidakseimbangan antara kepemilikan modal dan teknologi. Keterbatasan modal ekonomi dan teknologi yang dimiliki nelayan lokal menyebabkan keterbatasan

pada pencarian ikan di laut sehingga penangkapan ikan dilakukan *one day fishing trip* (Kusnadi, 2002:86 dalam Sudarso 2014).

Ketidakeimbangan antara kepemilikan dan kekuatan teknologi 'menjebak' masyarakat dalam kategori total *monetized society*. Masyarakat yang terbelenggu uang dengan system ekonomi yang telah memaksa mereka berhadapan dengan system ekonomi monopsony dan oligopoli. Keadaan ini sebagai mana tergambar pada masyarakat nelayan Wonokerto Kulon di Pekalongan (Nasikun dkk, 1998: 10-11).

Over fishing

Kebijakan Menteri Kelautan Fadel Muhammad pada awal masa jabatannya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di dunia (<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2005/2010-prospek-perikanan-nasional-cerah>), menuai kontroversi dikalangan praktisi konservasi Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta km² dan potensi lestari 6,7 juta ton per tahun (Subri, 2005), Fadel merasa mampu untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di dunia. Kebijakan ini dianggap tidak masuk akal dan bertentangan dengan kondisi perikanan Indonesia yang dilaporkan mengalami overfishing atau tangkap lebih. Data menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP I (Selat Malaka) dan WPP III (Laut Jawa) lebih dari 100%. (Suhana, 2006)

Overfishing dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang biologi, *overfishing* dapat diartikan sebagai tingkat mortalitas penangkapan yang lebih besar dari titik maksimum. Dari sisi yang lebih sederhana, *overfishing* berarti upaya penangkapan yang berlebihan terhadap suatu stok ikan. Secara umum, ciri-ciri perikanan yang mulai mengalami tangkap lebih adalah waktu melaut yang lebih lama, lokasi penangkapan yang semakin jauh, ukuran mata jaring semakin kecil, yang kemudian diikuti dengan penurunan produktivitas (hasil tangkapan per trip).

Ada 6 bentuk *over fishing* yang terjadi. Pertama, *growth overfishing*, tangkap lebih yang diakibatkan oleh penangkapan stok ikan sebelum sempat tumbuh menjadi individu yang cukup dewasa sehingga tidak bisa menutupi penurunan stok karena kematian alami. Pada kasus ini, tangkap lebih dapat diatasi dengan cara pembatasan upaya penangkapan, pengaturan ukuran mata jaring dan penutupan musim atau daerah penangkapan. Bentuk kedua dari *overfishing* adalah *recruitment overfishing*, tangkap lebih yang mengakibatkan jumlah indukan

tidak cukup banyak untuk melakukan rekrutmen bagi stok tersebut. Beberapa upaya yang direkomendasikan untuk mencegah terjadinya recruitment overfishing adalah proteksi terhadap sejumlah stok induk yang memadai. Ketiga, *biological overfishing*, kondisi tangkap lebih gabungan dari *growth* dan *recruitment overfishing* yang diakibatkan penangkapan stok melebihi kemampuan stok untuk mencapai MSY (*maksimum sustainable yield*). Pencegahan terhadap *biological overfishing* meliputi pengaturan upaya penangkapan dan pola penangkapan (*fishing pattern*). Bentuk keempat dari tangkap lebih adalah *economic overfishing*, tangkap lebih dimana upaya penangkapan melampaui usaha yang dibutuhkan untuk mencapai MEY (*maksimum economic yield*) dan upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kondisi ini adalah dengan memperbaiki pengelolaan dan upaya penangkapan. Kelima, *ecosystem overfishing* yang terjadi karena perubahan komposisi jenis stok sebagai akibat dari upaya penangkapan berlebihan pada spesies target (yang menghilang) dan tidak digantikan sepenuhnya oleh spesies pengganti. Bentuk terakhir dari overfishing adalah *malthusian overfishing*, tangkap lebih karena masuknya tenaga kerja baru, yang sebelumnya bekerja di darat, dan berkompetisi dengan nelayan tradisional untuk mengambil stok dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. (Widodo, 2008)

Secara global, keadaan *overfishing* merupakan keadaan yang sudah sangat serius untuk ditangani. Semakin lama jumlah armada semakin bertambah menjadi dua sampai tiga kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu dengan peralatan teknologi yang semakin canggih tanpa memperhatikan jumlah ketersediaan ikan dan species laut lainnya di alam. Misalnya di Inggris, berdasarkan pemberitaan di Media Indonesia (edisi 11 Mei 2010), bahwa, nelayan di Inggris harus berupaya lebih keras untuk mengais sisa-sisa ikan di perairan mereka. Mereka harus bekerja 17 kali lebih keras untuk menangkap ikan dengan jumlah yang sama dengan 120 tahun yang lalu. Hal itu disebabkan karena peralihan dari penggunaan dari kapal layar ke kapal motor yang berteknologi tinggi.

Penangkapan berlebih menjadi masalah karena berdasarkan data yang diperoleh oleh organisasi *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang dipublikasikan 2 tahun sekali menyebutkan bahwa lebih dari 80% stok ikan di dunia mengalami eksploitasi berlebihan atau telah dihabiskan atau dalam status kolaps. Dan secara global, stok predator di laut sudah habis sekitar 90%.

Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Sebagian besar perairan Indonesia telah

mengalami *overfishing*. Hampir separuh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami tangkap lebih yang sangat parah untuk ikan karang dan lobster, sementara lebih dari separuh WPP Indonesia telah mengalami tangkap lebih untuk udang penaeid (PRPT-BRKP dan PPPO-LIPI, 2002). Hal ini diperparah pula dengan masih digunakannya data tangkapan per unit usaha serta model *Maximum Sustainable Yield* (Tangkapan Maksimum Lestari) yang beresiko terhadap kelestarian dan keuntungan jangka panjang perikanan Indonesia (Mous dkk. 2005).

PPI

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambahnya perahu/kapal perikanan guna mendaparatkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan (Anonimous). Tempat Pendaratan Ikan (TPI) adalah tempat para nelayan mendaratkan hasil tangkapannya atau merupakan pelabuhan perikanan skala lebih kecil (Anonimous). Menurut DirJen Perikanan Departemen Pertanian (1981) Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya. Kriteria dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebagai berikut :

- 1) Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang dilakukan masih bersifat tradisional.
- 2) Jumlah Ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari.
- 3) Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus.
- 4) Panjang dermaga skurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M.
- 5) Memiliki lahan minimal seluas 2 Ha.

Fungsi dan Peranan PPI

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil.

Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI meliputi tiga hal pokok :

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi; tambat labuh perahu/kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi; penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan, pe-

- nyaluran, pengolahan dan pengawetan.
- 3) Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi; penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Ditinjau dari fungsinya, PPI merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/ 1997).

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian dilakukan melalui *observation non-participant* dan wawancara semi-struktur di PPI Peudada dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. Pengumpulan dan pembahasan *literature* menjadi pendukung teoritis dari penelitian lapangan yang dilakukan.

Informan

Informan atau nara sumber terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, para nelayan, tokoh masyarakat, dan panglima Laot

Keberadaan Peneliti

Ketua Peneliti, dengan tugas:

- a. Melakukan supervisi dan koordinasi dengan anggota peneliti.
- b. Melakukan wawancara semi-struktur dan mendalam kepada informan dengan dilengkapi dokumentasi (foto saat pengumpulan data berlangsung).
- c. Melakukan transkrip data yang didapat dari kunjungan lapangan.
- d. Melakukan interpretasi data laporan penelitian.

Anggota peneliti, dengan tugas:

- a. Melakukan komunikasi dan melaporkan hasil penelitian kepada ketua peneliti.
- b. Melakukan wawancara semi-struktur dan mendalam kepada informan dengan dilengkapi dokumentasi (foto saat pengumpulan data berlangsung).
- c. Melakukan transkrip data yang didapat dari kunjungan lapangan.

- d. Membantu Ketua peneliti dalam melakukan interpretasi data laporan penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Peudada Menjadi Alternatif Pendapatan Masyarakat

Provinsi Aceh diapit oleh dua perairan besar, yaitu Selat Malaka dan Samudera Hindia. Sebagian besar wilayah Aceh, 17 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota berada di daerah pesisir pantai. Kehidupan masyarakat bergantung dari hasil sektor perikanan laut. Letak geografis ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor perikanan menjadi sektor andalan bahkan unggulan (Asmawati dan Nazamuddin, 2013).

Namun demikian, bila dicermati secara umum bahwasanya kekayaan sumber daya laut belum menjadi sektor andalan dan alternatif bagi pendapatan nelayan secara keseluruhan. Gambaran secara umum memperlihatkan bahwasanya kehidupan para nelayan masih berada pada kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan Nasional di bidang kelautan dan perikanan yang masih menjadikannya sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*).

Potensi kekayaan yang ada di laut jauh lebih besar dibandingkan yang ada di daratan. Bila dikelola dan dijaga secara baik maka kekayaan laut Indonesia dapat menyumbang pendapatan negara sebesar 1,2 triliun dollar per tahun. (*tribunnews.com*, 11 Agustus 2014).

Potensi kekayaan laut Aceh belum dikembangkan secara baik untuk menjadikan alternatif pendapatan masyarakat. Menjadi pilihan sulit bagi masyarakat dalam memilih menjadi nelayan bila kenyataannya sekitar 70% kehidupan nelayan di Aceh hidup di bawah garis kemiskinan (*antaraaceh.com*, 18 Februari 2014).

Pemerintah Bireuen meningkatkan status PPI menjadi pelabuhan sebagai strategi kebijakan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah. Keberadaan PPI termasuk PPI Peudada membuka peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi. PPI sebagai pelabuhan khusus yang menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat, menjadi penunjang baik usaha perikanan laut maupun pelayaran. PPI berfungsi memberikan pelayanan optimal kepada kapal perikanan seperti pelayanan sebagai tempat pemusatan armada perikanan, tempat bongkar muat

hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik seperti air tawar, es batu, dan BBM. Pelayanan yang lain difokuskan pada pelayanan nelayan sebagai faktor produksi seperti aspek pengolahan, aspek pemasaran, dan aspek pembinaan masyarakat nelayan (*dkp.kotabarukab.go.id*, 1 Agustus 2014). Selain itu, khusus untuk PPI Peudada saat ini lokasi PPI telah menjadi salah satu alternatif tempat wisata di Kabupaten Bireuen.

Strategi lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pendanaan *multiyears* yang bersumber dari APBN, pembangunan pabrik es, SPBN, dan bengkel boat serta pengerukan pendangkalan Kuala. Untuk ruang pendingin sudah pernah dioperasikan, tapi tidak mencapai keberhasilan karena ada beberapa masalah teknis dilapangan. Begitu juga dengan keberadaan SPBN yang sebelumnya ada, namun saat ini tidak berfungsi lagi. Kuala yang telah dikeruk kembali dangkal. Pendangkalan ini karena faktor alam (*medanbisnisdaily.com*, 5 Agustus 2014).

Pemerintah daerah berencana akan berkerjasama dengan salah satu perusahaan untuk mengaktifkan kembali ruangan pendingin ini. Pemerintah sedang mencari solusi bagi tersediannya kembali SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), karena belum adanya kesepakatan dengan Pertamina untuk menghadirkan SPBN di PPI Peudada. Ini merupakan kebutuhan mendasar bagi nelayan, ketersediaan bahan yang cukup memudahkan jangkauan nelayan jika hendak melaut.

Nelayan memiliki anggapan bahwasanya pemerintah belum serius atau kurang perhatian dalam mengembangkan PPI Peudada. Buktinya hingga saat ini keinginan dan aspirasi mereka yang telah beberapa kali mereka sampaikan ke pemerintah belum juga terealisasi, seperti pengaktifan kembali SPBN dan pabrik es batu, pembuatan rumah ibadah dan wc umum, dan mengatasi pendangkalan Kuala Peudada serta kebutuhan pengecoran pinggir kuala supaya PPI lebih kokoh. Kebutuhannya es batu saat ini didatangkan dari Lhokseumawe karena pabrik es batu yang ada di Bireuen tidak mampu menyuplai kebutuhan es batu untuk semua PPI di Kabupaten Bireuen. Diperkirakan bila dapat ikan 1 boat sebanyak 7 ton maka kebutuhan es batu sebanyak 600 batang.

Jumlah boat (kapal) ukuran besar sebanyak lebih kurang 40 boat, sedangkan boat kecil berjumlah 30-an boat. Bila boat besar dapat membawa pulang lebih kurang 3 ton ikan sekali perjalanan maka penghasilan nelayan secara umum/ satu rombongan boat sebesar lebih kurang 30 juta per hari,

sedangkan boat kecil bila dapat membawa pulang lebih kurang 100 kg ikan dalam sekali penangkapan maka mereka dapat menghasilkan uang lebih kurang 2 juta per hari.

Kehidupan nelayan lokal masih terjatuh hutang. Boat-boat besar yang ada di PPI dimiliki oleh para toke boat. Mereka bagi hasil dari tangkapan yang mereka peroleh dalam sekali penangkapan. Umumnya mereka akan hutang minyak sebelum melaut ke kios pinjam barang khusus kebutuhan melaut. Walaupun ikan yang mereka dapatkan umumnya selalu ada terutama tergantung pada cuaca dan musim namun kehidupan ekonomi nelayan masih hidup pada garis kemiskinan. Penghasilan yang mereka peroleh hanya untuk kebutuhan sehari dua hari mereka. Bila mereka tidak melaut maka beban hutang dapat semakin bertambah. Rezeki yang mereka peroleh seperti rezeki 'harimau', maksudnya rezeki yang mereka peroleh tidak tentu, dapat besar ataupun kecil.

Membangun Daya Saing Daerah yang Berbasis Perikanan

Sebagai negara kepulauan dengan luas lautan dan kekayaan laut yang melimpah (potensi nomor satu di dunia), sangat beralasan dan rasional bila Indonesia menjadi bangsa maritim dengan mengandalkan perekonomian Nasional yang bersumber dari hasil laut. Namun disayangkan, hasil laut yang melimpah terus dinikmati bangsa lain. Kekayaan laut Indonesia sering diambil/ dicuri oleh nelayan dari negara lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketidakterseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menjaga kekayaan laut. Kerugian ini tidak hanya dialami oleh pemerintah tetapi langsung dialami nelayan. Betapa mengejutkan bila menyimak pendapat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi di tahun 2005, bahwasanya Negara telah dirugikan akibat pencurian ikan ilegal, diperkirakan Negara mengalami kerugian mencapai US\$4 miliar setiap tahun (NEWS, 2005).

Kondisi yang memprihatinkan ini disikapi secara tegas oleh Menteri Perikanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Susi Pudjiastuti. Menteri Perikanan, mengeluarkan daftar terbaru penangkapan 19 kapal pencuri ikan selama Desember 2014 yang dilakukan oleh KKP dibantu Polisi Air laut dan TNI AL. Bahkan Susi Pudjiastuti menyebutkan terdapat ribuan kapal asing, "Kalau saya bicara ada 7000-an kapal lalu lalang di perairan Indonesia itu bukan *bullshit*, bukan omong kosong," tegasnya (*finance.detik.com* dan *merdeka.com*, 19 Desember 2014).

Demikian juga yang terjadi di perairan Bireuen Aceh, banyak kapal yang tertangkap. Nelayan

Thailand sering tertangkap oleh patroli laut Aceh. Mereka melakukan pencurian ikan dengan pukat harimau. Pukat ini sangat membahayakan bagi ekosistem dan siklus hidup ikan di laut karena penangkapannya tidak hanya terhadap ikan-ikan berukuran besar tetapi anak-anak ikan yang masih berukuran kecil juga ikut tertangkap (upaya penangkapan *over fishing*).

Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 (BAB I, Pasal 1 no.17) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan bahwasanya kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan. Dalam hal ini tidak termasuk pukat harimau.

Pada sektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Bireun masih termasuk kedalam kelompok daerah yang memiliki daya saing lemah dalam mengembangkan potensi perikanan. Hal ini terbukti dari kecilnya APBK Bireuen - dibandingkan sektor lainnya - dalam pengembangan potensi perikanan tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (khususnya untuk daerah Peudada). Pengembangan infrastruktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilan pembangunan.

Secara umum dengan mengamati pendapat Arie Febrianto Mulyadi (Dosen Universitas Brawijaya) setidaknya dapat dianalisis bahwa kondisi dunia perikanan di Bireuen, Aceh secara keseluruhan, maupun secara Nasional memiliki permasalahan yang sama yang dipengaruhi maraknya *illegal fishing*, pencemaran laut, terbatasnya sumber permodalan, *over fishing*, dan belum dilakukannya modernisasi teknologi perikanan. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan modernisasi teknologi perikanan, pembangunan infrastruktur, dan memiliki peraturan yang tegas seperti penangkapan dan penenggelaman kapal *illegal fishing* dengan dukungan regulasi-regulasi khusus di sektor perikanan dan kelautan.

Untuk itu Pemerintah Bireuen harus membangun sektor perikanan melalui peningkatan produktivitas perikanan dan berbagai kegiatan industri yang terkait dengan mengatasi kendala sebagaimana disebutkan di atas. Peran dan fungsi pelabuhan besar dan PPI harus dilaksanakan dan ditingkatkan secara baik yang bermuara pada kesejahteraan nelayan.

5. Simpulan

Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (khususnya untuk daerah Kecamatan Peudada). Pengembangan infrastruktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilan pembangunan. Keterbatasan peralatan dan sarana fisik kelautan mengurangi keefektifan kegiatan eksplorasi dan penelitian kelautan.

Komitmen dan kelancaran dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Sampai saat ini tingkat komitmen pemerintah masih dipertanyakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan adanya keseriusan dari pelaksanaan kebijakan dalam mengembangkan daya saing daerah yang berbasis perikanan di Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Athanasoglou, P.P, Brissimis, S.N. and Delis, M.D. (2005). "Bank Specific, Industry Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability". *Bank Of Greece Working Paper*, no. 25.
- Ada 7.000 kapal asing di Indonesia, Susi: Itu bukan bullshit, <http://www.merdeka.com/uang/ada7000-kapal-asing-di-laut-indonesia-susi-itu-bukan-bullshit.html>, diakses pada 20 Desember 2014.
- Asmawati dan Nazamuddin, (2013), Disequilibrium Pasar Ikan Laut Aceh, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm.38-51, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Bisnis Aceh, Kapal keruk Rp 7 milyar milik Pemkab Bireuen jadi besi tua, <http://www.bisnisaceh.com/Umum/kapal-keruk-rp7-milyar-milik-pemkab-bireuen-jadi-besi-tua/index.php>, diakses pada 5 Agustus 2014.
- Budi Prasetyo, Kekayaan Laut Indonesia Dapat Menyumbang Pendapatan Negara 1,2 Triliun Dolar AS, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/11/kekayaan-laut-indonesia-dapat-menyumbang-pendapatan-negara-12-triliun-dolar-as>, diakses pada 11 Agustus 2014.
- Danuri, Rokhmin, 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fachrul Razi, Rumah Nelayan Miskin, <http://www.antaraaceh.com/2014/02/rumah-nelayan-miskin.html> (akses 18-02-2014).

- Kelautan dan Perikanan Bisa Tingkatkan PAD Bireuen, Sumber: <http://binpers.com/2014/11/kelautan-dan-perikanan-bisa-tingkatkan-pad-bireuen/>, diakses 25 November 2014.
- Melongok Kehidupan Nelayan yang Hidupnya Memprihatinkan, Sumber: http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94266:-melongok-kehidupan-nelayan-yang-hidupnya-memprihatinkan&catid=161:daerah&Itemid=41, diakses pada 1 Agustus 2014.
- Mous, P.J., Pet, J.S., Arifin, Z., Djohani, R., Erdmann, M.V., Halim, A., Knight, M., Pet-Soede, L., Wiadnya, G. (2005). Policy needs to improve marine capture fisheries management and to define a role for marine protected areas in Indonesia. *Fisheries Management and Ecology* 12: 259–268
- Muchlisin, Z.A., Nazir, Muhammad, Musman Musri (2012), Pemetaan Potensi Daerah untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan di Beberapa Lokasi dalam Provinsi Aceh: Suatu Kajian Awal, 1 (1): *April 2012 hlm. 68-77, Jurnal Depik Universitas Syiah Kuala.*
- Mulyadi, Arie Febrianto, (2014), Peluang dan Kendala Sektor Perikanan dan Kelautan, <http://www.slideshare.net/ariefebriantom/3-peluang-dan-kendala-sektor-perikanan-dan-kelautan?related=1>, diakses 6 Desember 2014.
- Nasikun, (1984), *Sistem Sosial Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Nelayan Keluhkan Pendangkalan Kuala Peudada, http://medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2014/03/15/84697/kolaborasi_dengan_musisi_jepang_di_konser_ultah/#.U-2Jj6P92gU, diakses pada 5 Agustus 2014.
- PPI Peudada Minim Fasilitas, Sumber: <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/29/ppi-peudada-minim-fasilitas>, diakses 7-09-2014.
- PRPT-BRKP dan PPPO-LIPI. (2002). Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia 2001. *Badan Riset Kelautan dan Perikanan- DKP bersama Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.* Jakarta
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 (BAB I, Pasal 1 no.17) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Riza Umary, Miskin di Tengah Sumber Daya Pesisir Melimpah, Sumber: <http://aceh.tribunnews.com/2013/11/20/miskin-di-tengah-sumber-daya-pesisir-melimpah> diakses pada 20 November 2013.
- Selama Desember 2014, Menteri Susi Tangkap 19 Kapal Pencuri Ikan. Sumber: <http://finance.detik.com/read/2014/12/19/161726/2782773/4/selama-desember-2014-menteri-susi-tangkap-19-kapal-pencuri-ikan>, diakses 20 Desember 2014.
- Suhana, 2006. "Overfishing dan Revitalisasi Rezim Perikanan". Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut - Institut Pertanian Bogor. Bogor, Sumber: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/16/opi01.html>
- Sudarso, Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Tekanan%20Kemiskinan%20Struktural.pdf>.
- Widodo, J., and Suadi. (2008). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2005/2010-prospek-perikanan-nasional-cerah>